



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**  
Kantor Sementara Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara  
Gowa, Jl. H. M. Yasin Limpo, Romangpolong, Kec. Somba Opu,  
Kab. Gowa (92113) Sulawesi Selatan Telp.: (+62-411) 8984475

## **SIARAN PERS**

---

---

### **SERAH TERIMA LKPD *UNAUDITED* TA 2020 PEMKAB MAMUJU**

*Gowa – Humas dan TU Perwakilan*

**Senin (05/04)** – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamuju *Unaudited* TA 2020 serta *Entry Meeting* Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2020 Pemerintah Kabupaten Mamuju. Mengingat laporan keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit BPK sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD.

LKPD *Unaudited* TA 2020 Kabupaten Mamuju diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI **Hery Ridwan**, dari Bupati Mamuju **Sitti Sutinah Suhardi** yang didampingi oleh Inspektur dan Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju **Muhammad Yani** dan **Budianto Muin**.

Dalam sambutannya, Hery Ridwan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju yang telah menyampaikan LKPD TA 2020 *Unaudited* kepada BPK di tengah bencana Gempa Bumi yang melanda Kabupaten Mamuju pada Jum'at, 15 Januari 2021 lalu karena mampu menyelesaikan LKPD yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Hery Ridwan menyampaikan bahwa BPK akan segera melakukan proses pemeriksaan terinci atas LKPD TA 2020 yang telah diserahkan tersebut dengan berlandaskan nilai-nilai Independensi, Integritas dan Profesionalisme serta mengajak Pemerintah Kabupaten Mamuju beserta jajarannya untuk mendukung kelancaran pemenuhan data/dokumen maupun informasi/keterangan yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa hingga proses pemeriksaan berakhir.

“Kami harapkan komitmen dan dukungan Pemerintah Mamuju beserta jajarannya untuk mendukung kelancaran pemenuhan data/informasi maupun informasi/keterangan yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa hingga proses pemeriksaan berakhir” terang Hery Ridwan.

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA**  
**PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**